

**ANALISIS KONVERGENSI ANTAR PROVINSI
(STUDI KASUS PULAU SUMATERA)**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang***



Oleh :

**ARIEF BUDIMAN
1202767/2012**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS KONVERGENSI ANTAR PROVINSI
(STUDI KASUS PULAU SUMATERA)

Nama : Arief Budiman

TM / NIM : 2012 / 1202767

Keahlian : Perencanaan Pembangunan

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2018

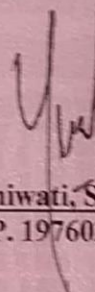
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



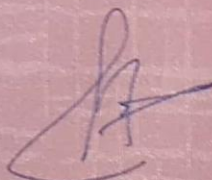
Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si
NIP. 19550505 197903 1 010

Pembimbing II



Yenniwati, SE, ME
NIP. 19760222 200501 2 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu ekonomi



Drs. Ali Anis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

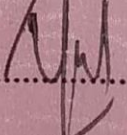
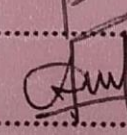
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS KONVERGENSI ANTAR PROVINSI (STUDI KASUS PULAU SUMATERA)

Nama : Arief Budiman
TM / NIM : 2012 / 1202767
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2018

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si	1..... 
2. Sekretaris	: Yeniwati, SE, ME	2..... 
3. Anggota	: Dr. Alpon Satrianto, SE, ME	3..... 
4. Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	4..... 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Budiman
NIM / TM : 1202767 / 2012
Tempat / Tanggal Lahir : Bukitiinggi / 17 Mei 1994
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Penago, Limbanang, Kec. Suliki, Kab. 50 Kota
Judul Skripsi : Analisis Konvergensi Antar Provinsi (Studi Kasus Pulau Sumatera)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis / skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran penulis sendiri, dengan bantuan dan arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain tanpa ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan nama pengarang di daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah diperoleh karena karya tulis ini. Serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, November 2018
Yang Menyatakan



Arief Budiman
NIM / TM : 1202767 / 2012

ABSTRAK

Arief Budiman, 2012/1202767. Analisis Konvergensi antar Provinsi (Studi kasus Pulau Sumatera). Skripsi Ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si dan Ibu Yeniwati, SE, ME.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Pengaruh investasi asing langsung terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera 2) Pengaruh *transfer payment* terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera 3) Pengaruh pembangunan manusia terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera 4) Pengaruh investasi asing langsung, *transfer payment*, pembangunan manusia secara bersama-sama terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera 5) Proses Konvergensi yang terjadi di Pulau Sumatera.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan *pooling* dengan periode waktu 2012-2017. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif yang terdiri atas analisis data panel dengan metode *Random Effect Model* dan Analisis panel dinamis dengan analisis *Generalized Method of Moments* (GMM). Untuk melihat signifikansi 1) Uji t dan 2) Uji F dengan taraf nyata 5%.

Hasil penelitian ini adalah 1) Investasi asing langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera 2) *Transfer payment* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera 3) Pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera 4) Investasi asing langsung, *transfer payment*, dan pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera 5) Pulau Sumatera mengalami proses konvergensi selama periode 2012-2017. Saran yang dikomendasikan dalam penelitian ini adalah menekan ketimpangan dengan kebijakan pembangunan yang bersifat *sustainable* agar terjadi pemerataan.

Kata kunci : Pendapatan per kapita, investasi asing langsung, *transfer payment*, pembangunan manusia dan konvergensi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada penulis dalam menyelesaikan draf skripsi yang berjudul “*Analisis Konvergensi Antar Provinsi (Studi Kasus Pulau Sumatera)*” dapat diselesaikan dengan baik. Serta Sholawat beriringan salam kepada manusia terbaik yakninya Nabiullah Muhammad ﷺ yang telah memberikan sinar pada peradaban manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan banyak mengalami kendala dan hambatan, namun berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala tersebut dapat diatasi. Daripada itu penulis ucapkan terimakasih atas nasihat, kritik, saran dan bimbingannya kepada Bapak Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si dan Ibu Yewiwati, SE, ME selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan berupa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Bapak Drs. Ali Anis M.S selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Ali Anis, M.S dan Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME selaku penguji dari skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, nasihat, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu staf perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis yang telah memberikan segala bantuan dalam segala aspek untuk penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan KakakTua 1A : Cukiak, Randi Setyadi, Ipul Hidayat, Polsek, Panjul, Jimbrong, Kamput, Wahyu Nata, Ripol, Dapit, Ardila, Dedek, Derri, Imas, Abul, Hanip dan Koyon
8. Rekan-rekan pada ormawa Korps Sukarela PMI unit Universitas Negeri Padang yang telah memberikan wadah dalam mengembangkan diri.
9. Rekan-rekan Fakultas Ekonomi dan Jurusan Ilmu Pengetahuan yang memberikan bantuan materi dan non materi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis meminta kritik dan sarannya dalam kesempurnaan skripsi ini.

Padang, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	13
A. Kajian Teori.....	13
1. Hipotesis Konvergensi, <i>Backwash Effect</i> dan <i>Spread Effect</i>	13
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	17
3. Teori Investasi Asing Langsung.....	20
4. Teori <i>Transfer Payment</i>	22
5. Teori Pembangunan Manusia.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Variabel dan Jenis Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Definsi Operasional.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
1. Analisis Deskriptif.....	40
2. Analisis Induktif.....	41
a. Model Regresi Panel (<i>Pooled Analysis</i>).....	41
b. Uji Asumsi Klasik.....	45
c. Pengukuran Konvergensi.....	48
d. Uji Hipotesis.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Penelitian.....	54
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	58
B. Analisis Induktif.....	71
1. Analisis Model Regresi Panel.....	72
2. Hasil Model Regresi Panel.....	75
3. Uji Koefisien Determinasi.....	78
4. Pengukuran Konvergensi.....	78
5. Uji Hipotesis.....	83
C. Pembahasan.....	86
1. Pengaruh Investasi Asing Langsung Terhadap Pendapatan Per Kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.....	86
2. Pengaruh <i>Transfer Payment</i> Terhadap Pendapatan Per Kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.....	89
3. Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Pendapatan Per Kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.....	92
4. Pengaruh Investasi Asing Langsung, <i>Transfer Payment</i> dan Pembangunan Manusia Terhadap Pendapatan Per Kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.....	94
5. Proses Konvergensi Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.....	95
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.....	5
1.2 Realisasi Investasi Asing Langsung, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2015-2017.....	7
2.1 Klasifikasi Pendapatan Per Kapita menurut Worldbank.....	16
4.1 Luas Provinsi, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017.....	55
4.2 Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) Menurut Harga Berlaku Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2012-2017.....	59
4.3 Investasi Asing Langsung (Juta US\$) Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatera 2012-2017.....	62
4.4 Dana Perimbangan (Milyar Rupiah) Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatera 2012-2017.....	66
4.5 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2012-2017.....	69
4.6 <i>Likelihood Ratio Test</i>	72
4.7 Uji Hausman.....	73
4.8 <i>Lagrange Multiplier Test</i>	74
4.9 Estimasi <i>Random Effect Model</i>	76
4.10 Konvergensi Sigma (<i>Sigma Convergence</i>).....	79
4.11 Hasil Estimasi Panel Dinamis GMM (<i>Generalized Method of Momment</i>).....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Persentase Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pulau Tahun 2017.....	2
2.1 Kerangka Konseptual.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

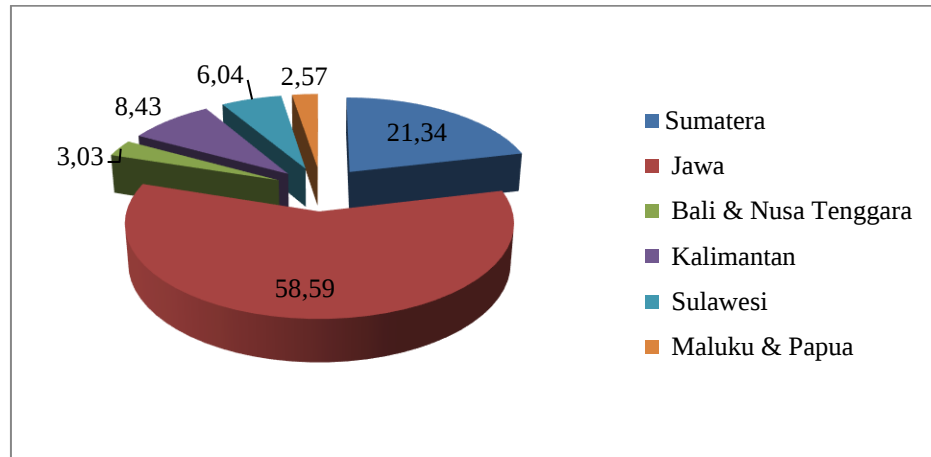
A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia yang tertuang didalam UUD 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan distribusi pendapatan yang sama. Pertumbuhan ekonomi yang cepat memiliki konsekuensi untuk menimbulkan tidak meratanya distribusi pendapatan. Tidak meratanya distribusi pendapatan akan menyebabkan perkembangan satu daerah dengan daerah lainnya berbeda.

Terdapat hambatan dalam pemerataan pendapatan antar daerah yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik sumber daya alam, sosial, ekonomi serta iklim yang terdapat pada suatu wilayah. Bahan baku produksi dan penguasaan faktor produksi pada suatu daerah menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan perekonomian. Konsentrasi perekonomian ini berdampak pada pemerataan distribusi pendapatan dimana hal ini dapat berpengaruh pada kesejahteraan. Konsentrasi pusat perekonomian dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Kondisi yang tidak merata timbul akibat tidak adanya pemerataan pembangunan ekonomi. Gambaran ketimpangan wilayah terlihat dengan adanya daerah maju dan daerah tertinggal. Ketimpangan pendapatan antar kawasan di Indonesia dapat terlihat pada masing-masing pulau, dimana Pulau

Jawa menjadi kawasan dengan pendapatan terbesar dibanding dengan kawasan lainnya.



Gambar 1.1 Persentase Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pulau Tahun 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.1 diatas memperlihatkan persentase distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 masing-masing kawasan di Indonesia. Persentase distribusi PDRB tahun 2017 memperlihatkan bahwa Pulau Jawa adalah kawasan dengan persentase distribusi PDRB terbesar dibandingkan dengan kawasan lainnya. Pulau Jawa menyumbangkan 58,59 persen dari total PDRB di seluruh kawasan Indonesia. Dengan demikian, Pulau Jawa memiliki *share* lebih dari setengah total PDRB seluruh kawasan di Indonesia. Sementara itu, kawasan dengan *share* PDRB terkecil di seluruh Indonesia adalah kawasan Maluku dan Papua dimana hanya memiliki *share* sebesar 2,57 persen dari total PDRB seluruh Indonesia.

Kondisi yang tidak merata antara kawasan Pulau Jawa dengan kawasan lainnya disebabkan oleh konsentrasi pusat pertumbuhan ekonomi yang berada pada kawasan Pulau Jawa. Kegiatan perekonomian di Pulau Jawa didominasi oleh sektor industri, jasa dan kegiatan ekonomi dengan penggunaan modal yang tinggi. Pendapatan di kawasan Pulau Jawa yang tinggi juga disebabkan oleh keberadaan pusat pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Kemudahan akses informasi dan kualitas pendidikan di kawasan Pulau Jawa menajamkan persentase distribusi PDRB dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Model pertumbuhan Solow (Jhinghan : 2012) menyatakan untuk mendorong pertumbuhan output diperlukan sejumlah penanaman modal dan investasi. dengan asumsi tingkat pengembalian modal yang semakin menurun (*diminishing return to capital*). Sehingga daerah dengan tingkat pendapatan rendah yang memiliki modal akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang kaya dengan modal relatif tinggi. Dalam jangka panjang daerah berpendapatan rendah akan mencapai kondisi *steady-state* dengan kondisi pendapatan per kapita yang sama. Peningkatan pendapatan suatu daerah dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar wilayah dan meningkatkan pemerataan pada setiap daerah.

Proses daerah dengan pendapatan rendah tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah berpendapatan tinggi disebut dengan konvergensi. Mankiw (2009) menjelaskan konvergensi akan terjadi apabila daerah berpendapatan rendah akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah berpendapatan tinggi. Dalam jangka panjang daerah-daerah akan

mencapai tingkat konvergensi yang sama. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa perekonomian suatu daerah mengarah pada kondisi mapan dan merata sehingga perekonomian daerah tersebut akan bergerak menuju pemerataan.

Todaro dan Smith (2014) memaparkan dua alasan utama kenapa daerah berkembang mampu mengejar (*catching up*) terhadap daerah berpendapatan tinggi dengan pertumbuhan yang lebih cepat. Transfer teknologi mempengaruhi daerah yang sedang berkembang mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan output tanpa membayar royalti. Daerah maju memiliki modal manusia dan modal fisik yang besar untuk menghasilkan output yang besar. Namun, produk marjinal dan profitabilitas investasi di daerah maju dengan tingkat modal yang tinggi akan lebih rendah dibandingkan dengan daerah sedang berkembang. Hingga daerah berkembang mampu menjadi daerah maju sebagai konsekuensi pertumbuhan yang meningkat.

Konvergensi dapat dilihat dengan kecenderungan pendapatan per kapita pada daerah sedang berkembang terhadap daerah yang maju. Ketidakteraturan pendapatan yang terjadi pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera tidak mampu memperlihatkan kesenjangan yang terjadi apabila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketidakteraturan ini dapat dilihat sepihak dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera dalam Juta Rupiah

No	Provinsi	Tahun			Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2016	2017
1	Aceh	25,81	26,94	28,23	4,39	4,77
2	Sumatera Utara	41,02	44,56	47,96	8,63	7,64
3	Sumatera Barat	34,63	37,35	40,32	7,85	7,96
4	Riau	102,89	104,95	105,99	2,01	0,99
5	Jambi	45,58	49,63	54,37	8,88	9,55
6	Sumatera Selatan	41,20	43,44	46,42	5,44	6,85
7	Bengkulu	26,85	29,08	31,37	8,33	7,87
8	Lampung	31,15	34,14	37,21	9,59	8,98
9	Kep. Bangka Belitung	44,43	46,44	48,90	4,53	5,31
10	Kepulauan Riau	101,15	106,78	110,31	5,57	3,31

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa data PDRB per kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera dimana Provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi tahun 2017 adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan Rp 110,31 Juta. Sementara itu, Provinsi dengan PDRB per kapita terendah tahun 2017 adalah Provinsi Bengkulu dengan pendapatan sebesar Rp 31,37 Juta. Tabel 1.1 juga memperlihatkan Provinsi dengan PDRB per kapita besar mengalami pertumbuhan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi berpendapatan per kapita yang rendah. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 0,99 dan 3,31 persen. Provinsi dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah justru pertumbuhan pendapatan per kapitanya lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini memperlihatkan Provinsi dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah bisa tumbuh lebih cepat

dibandingkan dengan Provinsi berpendapatan tinggi. Sehingga memungkinkan bagi daerah yang sedang berkembang untuk melakukan *catching up* terhadap daerah berpendapatan tinggi.

Pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan ketimpangan antar daerah dibutuhkan investasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pembiayaan dapat berasal dari eksternal maupun internal, salah satu instrumen yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari luar adalah penanaman modal asing (PMA), dan salah satunya adalah penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*). FDI sebagai sumber pembiayaan merupakan aliran modal yang relatif stabil dengan resiko kecil.

Pembiayaan selanjutnya adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam memenuhi kapasitas fiskalnya untuk pembiayaan kegiatan daerah. Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah ini disebut dengan dana perimbangan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Disamping membutuhkan investasi dan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan juga dibutuhkan sumber daya manusia (*man power*).

Pembangunan manusia adalah konsekuensi pembangunan dimana semakin baik perekonomian maka pembangunan manusia akan meningkat seiring waktu. Pembangunan manusia juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Pembangunan manusia dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 1.2 Realisasi Investasi Asing Langsung, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2015-2017

No	Provinsi	Realisasi FDI (Juta US\$)					Dana Perimbangan (Milyar Rupiah)					Indeks Pembangunan Manusia				
		Tahun			Growth (%)		Tahun			Growth (%)		Tahun			Growth (%)	
		2015	2016	2017	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017
1	Aceh	21,2	134,5	23,2	534,43	-82,75	1.561,8	1.572,5	3.741,2	0,68	137,92	69,45	70	70,6	0,79	0,86
2	Sumatera Utara	1.246,1	1.014,7	1.514,9	-18,57	49,30	1.521,3	5.219,3	7.235,4	243,09	38,63	69,51	70	70,57	0,70	0,81
3	Sumatera Barat	57,1	79,3	194,4	38,88	145,15	1.390,9	2.576,8	3.990,9	85,26	54,88	69,98	70,73	71,24	1,07	0,72
4	Riau	653,4	869,1	1.061,1	33,01	22,09	2.548,6	3.824,5	5.120,2	50,06	33,88	70,84	71,2	71,79	0,51	0,83
5	Jambi	107,7	61,0	76,8	-43,36	25,90	1.419,1	1.398,3	2.766,2	-1,47	97,83	68,89	69,62	69,99	1,06	0,53
6	Sumatera Selatan	645,8	2.793,5	1.182,9	332,56	-57,66	2.329,7	2.506,3	5.559,3	7,58	121,81	67,46	68,24	68,86	1,16	0,91
7	Bengkulu	20,6	55,7	138,7	170,39	149,01	1.209,0	1.616,5	2.132,9	33,70	31,95	68,59	69,33	69,95	1,08	0,89
8	Lampung	257,7	85,7	120,6	-66,74	40,72	1.514,3	3.158,7	4.031,5	108,59	27,63	66,95	67,65	68,25	1,05	0,89
9	Kep. Bangka Belitung	82,7	52,7	153,1	-36,28	190,51	1.130,4	1.126,3	1.666,7	-0,36	47,98	69,05	69,55	69,99	0,72	0,63
10	Kep. Riau	640,1	519,1	1.031,5	-18,90	98,71	1.246,1	1.464,9	2.096,1	17,56	43,09	73,75	73,99	74,45	0,33	0,62

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 (data diolah)

Tabel 1.2 memperlihatkan data realisasi investasi asing langsung, dana perimbangan dan indeks pembangunan manusia masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera. Realisasi penanaman modal asing di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Besaran nilai penanaman modal asing langsung dipengaruhi oleh jumlah proyek yang dibiayai oleh investasi asing itu sendiri. Tahun 2017 daerah yang memperoleh PMA terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan US\$ 1.182,9 Juta, perolehan ini turun jika dibandingkan dengan tahun 2016 Provinsi Sumatera Selatan memperoleh investasi sebesar US\$ 2.793,5 Juta. Sementara itu, pada tahun 2017 Provinsi Aceh menerima investasi hanya sebesar US\$ 23,2 Juta.

Investasi asing meningkatkan kemampuan konvergensi suatu daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Hasilnya, konvergensi kondisional yang dipengaruhi oleh penanaman modal asing langsung pada wilayah dengan pendapatan rendah-menengah tumbuh lebih cepat (Theseen, 2012). Meski terjadi fluktuasi pada penanaman modal asing langsung hampir pada seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, perekonomian tetap tumbuh meskipun agak lambat di beberapa Provinsi. Dalam jangka pendek investasi asing langsung tidak berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Namun penanaman modal asing langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang disebabkan oleh hasil ekonomi dari proyek yang dibiayai oleh penanaman modal asing langsung.

Dana perimbangan digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mekanisme

transfer payment kepada daerah. Dari tabel 1.2 juga dapat dilihat pada tahun 2017 setiap Provinsi di Pulau Sumatera memperoleh *transfer payment* yang meningkat dari tahun 2016. Provinsi Aceh memperoleh *transfer payment* terbesar dengan peningkatan 137,92% pada tahun 2017 menjadi Rp 3.741 Milyar dari Rp 1.572 Milyar tahun 2016. Sementara itu Provinsi Lampung memperoleh peningkatan *transfer payment* terkecil dengan peningkatan 27,63% dari Rp 3.158 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp 4.031 Milyar pada tahun 2017.

Fluktuasi dana perimbangan yang diperoleh daerah disebabkan oleh perbedaan masing-masing kapasitas fiskal yang mampu oleh keuangan daerah tersebut. Defisit anggaran dalam memenuhi kapasitas fiskal daerah dilakukan oleh pemerintah pusat agar otonomi daerah dapat dilaksanakan. Pemanfaatan *transfer payment* adalah untuk membantu kegiatan pemerintahan yang terbagi didalam Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk meningkatkan belanja perintah dibidang produktif. Peningkatan *transfer payment* ini diikuti dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pembangunan manusia adalah indikator keberhasilan ekonomi dimana apabila kondisi perekonomian baik akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pembangunan manusia juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana dengan baiknya pembangunan manusia akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dibidang perekonomian. Tabel 1.2 memperlihatkan sertiap tahunnya indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera selalu

meningkat dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki IPM sebesar 74,45 tahun 2017. Sementara itu Provinsi Lampung menjadi daerah dengan IPM terendah dibandingkan seluruh Provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, konvergensi yang diyakini didalam model Solow Swan bahwa Negara atau daerah yang sedang berkembang mampu untuk mengejar pendapatan daerah yang lebih tinggi. perkembangan wilayah ini dipicu oleh transfer teknologi dan modal dari daerah yang lebih maju kepada daerah yang sedang berkembang. Maka, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut masalah konvergensi d Pulau Sumatera dengan judul “**Analisis Konvergensi Antar Provinsi (Studi Kasus Pulau Sumatera)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh investasi asing langsung terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera?
2. Sejauhmana *transfer payment* pemerintah terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera?
3. Sejauhmana pengaruh pembangunan manusia terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera?
4. Sejauhmana pengaruh investasi asing langsung terhadap pendapatan per kapita, *transfer payment* dan pembangunan manusia secara bersama-sama terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera?

5. Apakah Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera mengalami Proses konvergensi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Pengaruh penanaman modal asing langsung terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera.
2. Pengaruh *transfer payment* terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera.
3. Pengaruh pembangunan manusia terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera.
4. Pengaruh investasi asing langsung, *transfer payment* dan pembangunan manusia bersama-sama terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera.
5. Proses konvergensi yang dialami oleh Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang konvergensi yang terjadi di Pulau Sumatera.

- b. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk riset masa yang akan datang, dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para peneliti lainnya yang tertarik dalam membahas konvergensi yang terjadi pada suatu daerah maupun Negara.

Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan masukan dalam mengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan perkembangan daerah dan wilayah.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Hipotesis Konvergensi, *Backwash Effect* dan *Spread Effect*

a. Hipotesis Konvergensi

Konvergensi pertama kali diperkenalkan oleh Solow (Jhinghan :2012) dimana Solow meyakini Negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi mengalami perlambatan pertumbuhan dan Negara miskin mampu untuk mencapai kondisi mapan (*steady state*). Kulhanek (2012) menjelaskan konvergensi adalah tingkat pertumbuhan antar Negara atau wilayah yang memiliki kecenderungan mengalami penurunan dari waktu ke waktu dengan asumsi tendensi Negara-negara atau wilayah dengan pendapatan rendah mengalami peningkatan pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan Negara atau wilayah yang lebih maju.

Teori ekonomi neoklasik (Jhinghan : 2012) berpendapat bahwa perekonomian akan bergerak menuju *steady state* atau kondisi mapan, pergerakan tersebut ditentukan oleh tingkat teknologi, tingkat investasi termasuk modal manusia dan modal fisik, tingkat pertumbuhan penduduk, serta tingkat depresiasi modal manusia dan modal fisik. Pergerakan perekonomian menuju kondisi mapan terjadi saat tingkat teknologi dan tabungan yang dimiliki suatu

perkeonomian tinggi dan tingkat pertumbuhan populasi serta depresiasi yang terjadi rendah, dan sebaliknya. Perbedaan tingkat tabungan, tingkat teknologi, tingkat pertumbuhan populasi, serta perbedaan karakteristik lainnya antarnegara atau antardaerah menyebabkan setiap perekonomian tidak memiliki tingkat kondisi mapan yang sama. Peningkatan pendapatan per kapita hanya akan terjadi sebesar tingkat teknologinya ketika suatu perekonomian telah berada pada kondisi mapannya.

Barro dan Sala-I-Martin (2004) menyatakan terdapat perbedaan dalam menganalisis kedua ukuran tersebut, yaitu :

1) Konvergensi Sigma (σ)

Konvergensi sigma (σ) merupakan ukuran konvergensi yang paling konvensional dalam mengukur kesenjangan antardaerah dalam periode tertentu. Konvergensi sigma diukur melalui dispersi yang terjadi dalam perekonomian yaitu melalui standar deviasi dari log pendapatan riil per kapita antardaerah. Konvergensi terjadi jika dispersi pendapatan riil per kapita antardaerah menurun, artinya perekonomian daerah dengan pendapatan yang lebih rendah mengalami pertumbuhan yang semakin cepat untuk mengejar daerah dengan pendapatan tinggi. Naum, jika tingkat dispersi pada pendapatan riil antar daerah meningkat, maka terjadi dispersi, yang berarti perlambatan

pertumbuhan ekonomi daerah miskin untuk mengejar daerah kaya.

2) Konvergensi Beta (β)

Konvergensi terjadi jika pertumbuhan ekonomi pada daerah dengan pendapatan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan tingkat pendapatan per kapita pada awal periode, inilah yang dimaksud dengan konvergensi beta (β). Kelebihan konvergensi beta (β) adalah kemampuannya dalam analisis dinamis yang dapat mengukur kecepatan konvergensi melalui the (*half-life convergence*) waktu yang dibutuhkan untuk menutup setengah dari kesenjangan awal yaitu jumlah tahun yang dibutuhkan suatu wilayah untuk mencapai konvergensi.

Salah satu hipotesis dalam konvergensi beta adalah konvergensi absolut yaitu konvergensi yang terjadi ketika terdapat hubungan negatif antara pendapatan per kapita di awal periode dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan per kapita selama periode penelitian. Hipotesis bahwa disebut konvergensi β dibedakan menjadi dua, yaitu konvergensi β absolut dan konvergensi β kondisional. Konvergensi β absolut terjadi ketika ekonomi yang miskin cenderung tumbuh lebih cepat per kapita

dibandingkan yang kaya tanpa melihat karakteristik perekonomian lainnya. Sedangkan konvergensi β kondisional ekonomi yang miskin cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan yang kaya dengan melihat karakteristik perekonomian lainnya. Dengan demikian konvergensi β kondisional menyatakan bahwa perekonomian akan berkonvergensi pada kondisi mapan masing-masing yang dipengaruhi oleh berbagai variabel kontrol seperti tingkat infrastruktur dan pertumbuhan populasi.

Sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur konvergensi, pendapatan per kapita memiliki klasifikasi berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pada suatu Negara maupun daerah. Berikut klasifikasi pendapatan per kapita menurut *Worldbank* :

Tabel 2.1 Klasifikasi Pendapatan Per Kapita Menurut Worldbank

Tingkat	PDB / PDRB per kapita (Menggunakan kurs 2017 dalam juta Rupiah)
<i>Low Income</i>	< 13.547.000
<i>Lower middle income</i>	13.560.880 – 53.313.400
<i>Upper middle income</i>	53.326.880 – 164.927.800
<i>High income</i>	>164.927.800

Sumber : Worldbank

b. *Backwash Effect* dan *Spread effect*

Myrdal (Jhinghan : 2012) menyatakan motif laba yang dimiliki oleh daerah mengharapka keuntungan tinggi dan daerah lain mengalami keterbelakangan. Kekuatan pasar bebas meningkatkan

ketimpangan antar daerah yang dipicu oleh kebijakan industry, perdagangan, perbankan, asuransi dan lainnya. Pada ekonomi yang berkembang memiliki kecenderungan memberikan *high return* pada daerah yang lebih maju dan langkah ini dapat menyebabkan turunnya ketimpangan pada beberapa daerah dengan mengorbankan daerah lain yang stagnan.

Myrdal (Jhinghan : 2012) meyakini dalam perkembangan wilayah akibat peningkatan investasi, migrasi penduduk dan peningkatan perdagangan dapat menyebabkan semakin tajamnya tingkat ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Daerah yang sedang berkembang apabila terjadi peningkatan permintaan dapat menstimulasi investasi dimana dapat memicu pendapatan dan permintaan. Perkembangan daerah yang maju yang menjadi pusat ekspansi ekonomi dapat menciptakan kekurangan modal pada daerah yang tertinggal, hal ini disebut *backwash effect*.

Myrdal juga menyatakan untuk menghadapi *backwash effect* dalam momentum perkembangan dari ekspansi ekonomi yang berdampak pada daerah lain. Daerah lain yang berada pada pusat perkembangan ekonomi akan membutuhkan bahan baku untuk kegiatan ekonomi yang diproduksi oleh daerah berbasis pertanian dan pemberdayaan sumber daya alam. Selanjutnya, dampak sebar dari ekspansi ekonomi akan menstimulasi terjadinya *self-expansion* dari pusat perekonomian yang baru.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kegiatan perekonomian pada suatu Negara maupun daerah yang bergerak secara *sustainable* dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi yang merupakan inti dari kegiatan perekonomian suatu Negara yang dilihat dari kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan output (nilai tambah) dalam waktu tertentu. Output yang dihasilkan memasukkan hasil produksi yang dihasilkan oleh warga negara asing yang berdomisili di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Untuk menghitung besaran pendapatan nasional maupun pendapatan regional, Bank Indonesia memiliki tiga pendekatan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran sebagai berikut:

a. Pendekatan Pendapatan

Penghitungan dengan metode ini dihitung dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh dari semua pelaku ekonomi dari kegiatan ekonominya di suatu wilayah negara atau daerah. Pendapatan tersebut diperoleh dari faktor produksi yang

digunakan seperti tanah, tenaga kerja, gedung, modal dan keahlian wirausaha. Rumus penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan sebagai berikut.

$$PN = R + W + I + P + (s-t) + Nfp \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana :

PN : Pendapatan Nasional

R : *Rent* (jumlah sewa yang diterima oleh seluruh faktor produksi)

W : *Wages* (jumlah gaji yang diperoleh)

I : *Interest* (jumlah tingkat bunga yang diterima oleh pemilik modal)

P : Profit (keuntungan yang diterima oleh pengusaha)

(s-t) : Subsidi dan pajak tak langsung

Nfp : Pembayaran faktor produksi bersih dari luar negeri

b. Pendekatan Produksi

Pendapatan dengan metode ini dihitung berdasarkan keseluruhan nilai akhir (*final goods*) dari output yang dihasilkan oleh semua sektor-sektor di wilayah suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Sektor-sektor yang dihitung dengan pendekatan ini meliputi sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Konstruksi; Perdagangan, Restoran, dan Hotel; Pengangkutan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Jasa-

jasa. Penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$PN = P_1 Q_1 + \dots + P_n Q_n \dots \dots \dots (2.2)$$

Dimana :

PN = Pendapatan Nasional

P = *Price* (harga)

Q = *Quantity* (jumlah produk yang dihasilkan)

c. Pendekatan Pengeluaran

Penghitungan dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menghitung seluruh komponen pengeluaran yang dirinci menurut komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (termasuk lembaga nirlaba), pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor dan impor (BPS, 2014). Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan ini digunakan rumus seperti berikut :

$$PN = C + I + G + (X - M) \dots \dots \dots (2.3)$$

Dimana :

PN : Pendapatan Nasional

C : *Consumption* (Pengeluaran masyarakat)

I : Investasi (Pengeluaran perusahaan)

G : *Government* (Pengeluaran pemerintah)

(X - M) : *Net Export*

3. Teori Investasi Asing Langsung

Investasi asing menurut UU No. 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik sepenuhnya menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan pemodal didalam negeri. Arus modal yang masuk dari luar negeri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu utang luar negeri, investasi portfolio, dan penanaman modal asing langsung (*foreign Direct Investment*, FDI). Secara umum, FDI adalah bentuk investasi yang ditanamkan langsung dan bergerak di berbagai bidang. Di dalam arus FDI tidak termasuk investasi portfolio global berbentuk saham lewat jual beli di bursa, obligasi dan surat berharga lainnya.

Dalam teori FDI (Popovici : 2014) dengan pendekatan *endowment factors*, FDI ditentukan oleh tingkat pengembalian yang tinggi (*rate of return*) terhadap faktor produksi. Dalam kerangka teori Heckscher-Ohlin (H-O), dimana diasumsikan terdapat dua negara dua faktor produksi, dan dua barang, maka FDI (dinyatakan dengan arus capital/modal) terjadi dari negara-negara yang berlimpah capital/modal (*capital abundant*), yang pada umumnya memberikan tingkat pengembalian yang rendah, ke negara yang berlimpah tenaga kerja (*labor abundant*) dengan tingkat pengembalian yang umumnya relative lebih tinggi. Kelemahan H-O ini dalam menjelaskan fenomena arus modal H-O terlalu sederhana sehingga tidak dapat menjelaskan fenomena arus modal

yang terjadi diantara dua negara yang sama-sama berlimpah capital/modal ataupun sama-sama berlimpah tenaga kerja.

Teori FDI dengan pendekatan mikroekonomi mendasarkan teorinya pada teori perusahaan (*theory of the firm*) dimana analisisnya menekankan pada maksimisasi profit melalui *cost-benefit analysis*. Teori-teori mikro berfokus pada ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*), keinginan perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan ekspansi dan meraih pangsa pasar yang lebih besar (*market power*), *economies of scale*, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, teori FDI lebih mengarah pada studi ekonomi mikro yang membahas fungsi produksi suatu perusahaan dimana FDI tersebut ditanamkan, karena pada kenyataannya investor asing cenderung menanamkan modalnya langsung pada bidang/sektor atau perusahaan yang dipilihnya.

Hakizimana (2015) menjelaskan bahwa arus masuk modal asing langsung (FDI) akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan memicu meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dengan pemanfaatan yang tepat dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui proyek proyek strategis. Stabilitas ekonomi sangat mempengaruhi kepercayaan investor asing dalam melakukan penanaman modalnya di wilayah tersebut.

Tiberiu (2015) menjelaskan bahwa jangka panjang investasi langsung dan portofolio memberikan pengaruh dalam jangka panjang

dengan mempertimbangkan instrument ekuitas dan investasi. Paket insentif dan dampak investasi tersebut disebabkan oleh oleh investasi langsung dan portofolio yang telah dilaksanakan. Dampak ini disebabkan oleh investasi dari dalam maupun investasi dari luar negeri. Namun hasil utang yaitu investasi portofolio asing (*Foreign Portfolio Investment*) tidak memiliki dampak kepada pertumbuhan perekonomian baik pendapatan per kapita.

4. Teori *Transfer Payment*

Kegiatan pemerintah berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan umum bagi masyarakat yang secara ekonomis dan transparan, seperti melaksanakan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan dan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur kebijaksanaan perekonomian dengan negara lainnya.

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat. Pada umumnya perbelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat *full employment*. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian *full employment*. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yaitu

kebijakan fiskal, moneter dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak (Mankiw, 2009).

Kebijakan fiskal membuat suatu Negara atau daerah mengelola penerimaan dan pengeluarannya untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya secara mandiri. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai pasal 5 UU No. 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Penyerahan urusan dan pemberian sumber pendanaan dalam bentuk kebijakan perimbangan keuangan pada daerah otonom, pada hakekatnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat dan prioritas daerah guna mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, serta secara lebih luas diharapkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan atau ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

- a. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004:4). Dan dana perimbangan terbagi dalam 3 kategori :

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan

desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam diantaranya Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sementara dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi fiskal (UU No. 33 Tahun 2004).

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN dan pemanfaatan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan DAU diformulasikan untuk menentukan besaran DAU yang diterima masing-masing daerah dengan :

1) Formula DAU

Formulasi DAU menggunakan pendekatan celah fiskal dan Alokasi dasar. Celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara

kebutuhan fiskal (fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar.

Formulasi DAU adalah sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)} \dots (2.4)$$

Dimana :

AD = Gaji PNS

CF = Kebutuhan Fiskal- kapasitas fiskal

2) Variabel DAU

Kebutuhan fiskal yang dibutuhkan oleh daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) per kapita. Kapasitas fiskal yang merupakan sumber pendanaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

3) Metode Penghitungan DAU

a) Alokasi Dasar (AD)

Besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat dengan peraturan di daerah tersebut.

b) Celah Fiskal (CF)

Dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan dengan CF nasional dengan alokasi DAU celah fiskal nasional. Untuk celah fiskal suatu daerah

dihitung berdasarkan dengan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Diformulasikan sebagai berikut :

Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$Kbf = TBR(a_1IP + a_2IW + a_3IPM + a_4IKK + a_5IPDRB).....(2.5)$$

Dimana :

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

A = Bobot Indeks

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB = Indeks Pendapatan Domestik Regional Bruto

Kapasitas Fiskal (KpF)

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA.....(2.6)$$

Dimana :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Penerimaan Sumber

Daya Alam

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas (UU No. 33 Tahun 2004). Program-program yang dapat didanai berdasarkan Dana Alokasi Khusus meliputi bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan dan perdagangan.

Pendistribusian Dana Alokasi Khusus oleh Pemerintah kepada Daerah ditetapkan berdasarkan tiga kriteria, kriteria tersebut meliputi kriteria umum, khusus dan teknis. Kriteria-kriteria tersebut adalah :

- 1) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS daerah.
- 2) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan karakteristik daerah.
- 3) Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/departemen teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan DAK di masing-masing daerah.

5. Teori Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup layak. Selanjutnya BPS menyatakan dalam mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Sebagai ukuran kualitas hidup pembangunan manusia dibangun berdasarkan tiga pendekatan dimensi dasar. Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi pembangunan manusia atau indeks pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut :

- a. *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- b. *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- c. *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Menurut Todaro (2014) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

- a. Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
- b. Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam *self esteem* (jati diri).
- c. Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan masyarakat bisa menyalurkan hak suara dan melaksanakan tugas dan kewajibannnya yang dilindungi oleh hukum.

Pembangunan manusia merupakan indikator penting dalam kemajuan ekonomi suatu Negara, demikian juga sebaliknya kemajuan ekonomi suatu Negara juga ditentukan oleh pembangunan manusianya

baik dari aspek materi dan non-materi. Palinescu (2015) menyatakan pentingnya modal manusia dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara yang dinyatakan dengan hubungan signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah kapasitas manusia yang inovatif dan dan kualifikasi tenaga kerja terdidik yang diharapkan didalam sektor sektor perekonomian. Kapasitas manusia yang baik akan mampu menggunakan dan menciptakan teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian akan berdampak pada penerimaan yang akan diperoleh oleh penduduk yang bekerja di sektor ekonomi.

Selain tingkat pendidikan, modal manusia juga ditunjang oleh tingkat kesehatan penduduk yang baik. World Health Organization (2017) menyatakan kemampuan suatu Negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang representatif dan menyeluruh dapat meningkatkan kesehatan penduduk menjadi lebih baik. Hal akan berdampak pada meningkatnya angka harapan hidup dan menekan kemiskinan. Serta tingkat kesehatan yang baik akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang dipicu oleh produktivitas, harapan hidup yang tinggi.

B. Penelitian Terdahulu

Taosige Wau (2015) analisis σ konvergensi pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah di Sumatera Utara mengalami proses konvergensi sedangkan pembangunan ekonomi antar kabupaten masih mengalami divergensi. Sedangkan dengan menggunakan analisis konvergensi

beta menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota mengalami proses konvergensi dengan kecepatan proses konvergensi yang bervariasi pada masing-masing kelompok daerah.

Andrian Syah Malik (2014) menyatakan Penghitungan konvergensi sigma menggunakan standar deviasi log PDRB per kapita antar provinsi, sementara penghitungan konvergensi beta menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konvergensi sigma dan konvergensi beta setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001-2012. Variabel PMA, dana perimbangan dan IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah.

Ayu Savitri Gama (2009). PDRB per kapita di Provinsi Bali tidak mengalami konvergensi apabila dilihat dari tingkat dispersi PDRB per kapita 9 kabupaten/kota (berdasarkan koefisien variasi dan standar deviasi) yang terus meningkat ini, serta menunjukkan konvergensi bruto tidak terjadi pada PDRB per kapita 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 1993- 2006. Dengan melihat koefisien konvergensi beta = 0,049 yang bernilai positif, menegaskan bahwa telah terjadi divergensi bukannya terjadi konvergensi dalam disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Faktor penentu disparitas yang dianalisis dengan regresi linier berganda menunjukkan hasil dimana penentu disparitas yang signifikan secara statistik adalah, jumlah penduduk yang bekerja (LnBK) sedangkan tingkat pendidikan (SLTA), alokasi investasi fisik (LnPMTDB) tidak berpengaruh secara signifikan.

Penentu konvergensi yang diestimasi dengan regresi data panel adalah faktor PDRB Per kapita Awal ($\ln Y_n$) dan alokasi investasi ($\ln \text{PMTDB}$) yang menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja ($\ln \text{BK}$), dan tingkat pendidikan (SLTA) tidak berpengaruh secara signifikan dan parsial terhadap perkembangan PDRB per kapita ($\ln Y_t$) serta upaya mencapai konvergensinya.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai kerangka berfikir bagi peneliti untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Penelitian ini menganalisis proses konvergensi dan faktor yang mempengaruhi Konvergensi Provinsi-Provinsi pulau Sumatera.

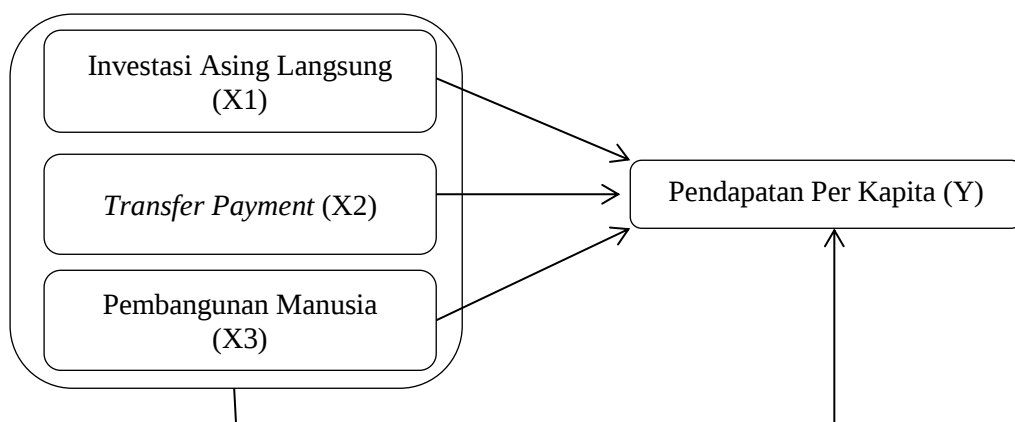
Pendapatan per kapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara atau daerah dalam waktu tertentu. Dimana pendapatan per kapita diketahui dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara atau daerah dengan jumlah penduduk Negara atau daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Diukur menggunakan satuan rupiah per individu.

Investasi asing merupakan kegiatan penanaman modal baik investasi portofolio dan investasi langsung untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh para investor asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan investor dalam negeri. Bentuk investasi asing yaitu investasi langsung dan

investasi portfolio dalam menunjang perekonomian suatu Negara. Penanaman modal asing diukur dalam satuan US\$.

Transfer Payment atau transfer dari pusat kepada daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah otonom dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi. *Transfer payment* digunakan untuk memenuhi kapasitas fiskal suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan maupun kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum *transfer payment* diukur dalam satuan Milyar Rupiah.

Pembangunan manusia adalah proses pembangunan manusia yang bertujuan agar mampu memiliki banyak pilihan dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Keberhasilan pembangunan manusia menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang akan berdampak pada kualitas manusia dalam perekonomian suatu Negara. Pembangunan ekonomi yang diukur menggunakan indeks pembangunan manusia menjadikannya sebagai indikator kemajuan suatu Negara.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi asing langsung terhadap pendapatan per kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *transfer payment* terhadap pendapatan per kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembangunan manusia terhadap pendapatan per kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi asing langsung, *transfer payment*, pembangunan manusia terhadap pendapatan per kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \text{salah satu koefisien } \beta \neq 0$$

5. Terjadi proses konvergensi pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera

$$H_0 : \text{Terjadi Divergensi}$$

$$H_1 : \text{Terjadi Konvergensi}$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan regresi panel, analisis tentang konvergensi dan pembahasan terhadap hasil penelitian ini, dengan variabel penanaman modal asing langsung, pengeluaran pemerintah dan pembangunan manusia terhadap variabel terikat pendapatan per kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera baik secara parsial maupun bersama-sama. Perhitungan terhadap konvergensi dengan menggunakan konvergensi sigma (σ) dan konvergensi beta (β), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian menjelaskan bahwa nilai investasi asing asing memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Hasil pengujian menjelaskan bahwa nilai *transfer payment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Hasil pengujian menjelaskan bahwa nilai pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera.

4. Hasil pengujian menjelaskan bahwa Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera mengalami proses konvergensi dan bergerak menuju kondisi mapan (*steady state*).

B. Saran

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dan dari hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah pusat untuk fokus membangun daerah dengan pendapatan per kapita yang berada pada *lower middle income* seperti Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung dengan mengalokasikan anggaran secara proporsi dan tepat sasaran agar menstimulasi peningkatan pendapatan per kapita masing-masing Provinsi tersebut. Sehingga di masa yang akan datang seluruh Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera dapat mencapai kondisi *steady state*.
2. Bagi pemerintah daerah dengan pendapatan per kapita *lower middle income* di Pulau Sumatera agar memberikan kebijakan dan regulasi yang dapat mempermudah para investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya pada Provinsi terkait. Sehingga akan meningkatkan *capital accumulation* dalam kegiatan yang bersifat ekonomis dan meningkatkan pembangunan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai konvergensi agar menemukan faktor-faktor yang dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan proses konvergensi di Pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Sri Karima, dkk. 2018. Convergence Analysis of Economic Growth in East Java. *Jurnal JEJAK* vol 11 (1) 2018.
- Ajija, R. Shochrol, dkk. 2011. *Cara Cerdas Mengusai Eviews*. Jakarta : Salemba Empat.
- Aulia, Manda Khairatul. 2017. Analisis Integrasi dan Konvergensi Ekonomi ASEAN. Tesis Publikasi. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. <https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html> diakses November 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- _____. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah*. Badan Pusat Statistik.
- Barro, Robert J. & Xavier Sala-i-Martin. 2004. *Economic Growth Second Edition*. The MIT Press, London.
- Blaško, Michaela. 2016. Sigma Convergence Testing Across Selected European Countries. *Journal of Theoretical and Applied Computer Science* Vol. 10 No. 2, 2016 pp.33-40.
- Bucur, Iulia Andreea & Stangaciu. 2015. The European Union Convergence In Terms Of Economic and Human Development. *Jurnal CES Working Papers Volume VII*, Issue 2.
- Checherita, Christina, Chritiane Nickel and Philip Rother. 2009. The Role Of Fiscal Transfers For Regional Economic Convergence In Europe. *Working Paper Series No 1029*, European Central Bank
- Gama, Ayu Savitri. 2009. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Februari 2009 Vol. 1 No. 2.
- Gujarati, Damodar. 2007. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Hakizimana, Joseph. 2015. *The relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and GDP per capita in Rwanda*. E-Journal dari <https://ssrn.com/abstract=2598413> diakses tanggal 29 Januari 2018.